# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.[[1]](#footnote-2) Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentutakan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.[[2]](#footnote-3)

Sebagai Negara berkembang, Indonesia banyak melakukan kerjasama internasional dalam berbagai bidang dan negara didunia. Kerjasama internasional sebagai suatu bentuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara lain dalam berbagai bidang penting untuk menyokong kepentingan rakyat. Selain itu, kerjasama yang bersifat mutualisme ini dapat mempererat hubungan kedua negara. Indonesia sudah memulai kerjasama internasionalnya dengan negara-negara lain sesaat setelah proklamasi kemerdekaan. Kerjasama internasional ini terutama dilakukan dengan negara-negara sahabat. Hingga saat ini, Indonesia telah membangun berbagai bentuk kerjasama internasional dengan lebih dari 160 negara di lima benua.

Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral. Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdi pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara.

Politik Luar Negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Hal ini juga terlihat jelas pada implementasi Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI) yang tampak memiliki karakteristik dan gaya berbeda beda ditiap-tiap periode pemerintahan. Periode Orde Lama PLNRI memiliki karakteristik berhubungan akrab dengan kubu negara-negara komunis, serta bergaya *Konfrontatif*. Periode Orde Baru PLNRI memiliki karakteristik berhubungan karib dengan kubu negara-negara barat serta bergaya *Low Profile-Kooperatif*. Sedangkan pada periode Orde Reformasi PLNRI memiliki karakteristik berkawan dengan semua negara serta bergaya *Aktif Diplomatis*. Perubahan karakteristik dan gaya dalam pelaksanaan PLNRI lebih sering disoroti dari aspek situasi dan kondisi dalam negeri, perubahan karakteristik PLNRI akan disoroti dari aspek perubahan situasi dan kondisi lingkungan internasional. Sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Menurut Hatta, politik “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Istilah “aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. (Mohammad Hatta, 1976:17).

Menurut perspektif sebuah negara, diplomasi terdiri dari perumusan, pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri. Diplomasi adalah instrumen negara melalui perwakilan formal maupun tidak formal, serta aktor-aktor lain yang mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luas menggunakan korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi, kunjungan-kunjungan dan aktivitas lainnya.

Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi didalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.[[3]](#footnote-4)

Hubungan diplomatik merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dan perannya dalam hubungan internasional. ASEAN*(Association of Southeast Asian Nations)*merupakan suatu bentuk kerjasama multilateral antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN menjalin hubungan kerjasama bilateral untuk mempererat hubungan diplomatiknya. Laos merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang kontribusinya cukup baik. Dengan luas wilayah negara 239.800 km2, Laos mempunyai penduduk yang tergolong jarang. Pada pertengahan tahun 2004, jumlah penduduk Laos hanya 5,8 juta jiwa, dengan angka kelahiran 36 dan angka kematian 13. Rata-rata pertumbuhan penduduk alami Laos adalah 2,3% per tahun. Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah penduduk Laos akan mencapai 8,6 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah kurang lebih 6,4 juta jiwa.[[4]](#footnote-5)

Republik Demokratik Rakyat Laos merupakan negara dengan *single party state* yaitu LPRP (*Lao People’s Revolutionary Party*) yang berhaluan komunis. LPRP memilki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan pengendalian seluruh aspek kehidupan di Laos. Pemilihan umum pertama, sejak berkuasanya pemerintah komunis di Laos (1975), dilaksanakan pada tahun 1989. Setelah pemilu disusun konstitusi baru pada tahun 1991 yang disahkan oleh *National Assembly* (NA) pada tanggal 14 Agustus 1991. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Adapun Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh NAuntuk masa bakti lima tahun, sedangkan Perdana Menteri dan Anggota Kabinet ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan NA yang merupakan Majelis tipe Unikameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Saat ini pemerintah dipimpin oleh Presiden Bounnhang Vorachith sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri Thonglun Sisoulith sebagai KepalaPemerintahan.[[5]](#footnote-6)

Perkembangan politik Laos secara umum depat diuraikan sejak usainya periode revolusi fisik tahun 1975, Laos memasuki periode konsolidasi nasional dan pembangunan. Pada tahun 1986 bermodalkan stabilitas nasional yang mantap dan terkendali, Laos mulai membuka diri dan berinteraksi dengan masyarakat internasional dengan meluncurkan program “*New Econimic Mechanism”*(NEM)*.* Sejak saat itu, Pemerintah Laos telah melakukan berbagai pembenahan melaui *Governance Reform Programme* yang bertujuan menigkatkan pelayanan dan partisipasi publik, supremasi hukum dan manajemen keuangan nasional.

Dalam meningkatkan posturnya ditingkat regional, Laos mencanangkan visi negaranya sebagai *Land-linked Country* dan *Battery of ASEAN* dengan memanfaatkan peran vitalnya sebagai *hub* bagi pertumbuhan ekonomi di *mainland* Asean. Di bidang pertahanan dan keamanan, Laos sangat tergantung pada Vietnam dan memandang Vietnam sebagai *political reference point.* Walaupun kapasitas angkatan bersenjata Laos masih sangat rendah, namun mereka berperan aktif dalam mekanisme kerjasama keamanan perbatasan regional, terlebih mengingat penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Laosterbentuk sejak terjalinnya pembukaan diplomatik kedua negara yang terjadi pada 30 Agustus tahun 1957 yang dan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang. Sejak saat itukerjasama antar kedua negara berjalan dengan baik dan hampir tidak ada masalah yang berarti.Selain menjaga hubungan baik pada tingkat bilateral, kedua negara juga menjalinkegiatan saling memberikan dukungan pada berbagai forum regional maupuni nternasional.[[6]](#footnote-7)

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Laos beradadalam posisi yang saling melengkapi, yakni kedua negara tersebut berpotensi untuk mengisi satu sama lain. Tercermin dalam kondisi masing-masing negara yang masih membutuhkan negara lainnya untuk melengkapi kebutuhan dalam negerinya. Di satu pihak, Indonesia memerlukan lahan untuk berinvestasi, pasar untuk memasarkan berbagai investasi di berbagai bidang dan produk-produk ekspor Indonesia. Di lain pihak, Laos memerlukan para ahli, tenaga kerja dan potensi sumber daya manusia yang besar. Hubungan bilateral yang baik diantara kedua negara telah terjalin sejak lama, bahkan dalam forum regionalkerjasama ini semakin nyata dengan berdirinya forum kerjasama ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations)*.

Hubungan yang erat kedua negara terlihat dari meningkatnya frekuensi saling kunjung pejabat tinggi kedua negara dan saling dukung posisi dan pencalonan masing-masing di berbagai lembaga internasional. Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah pejabat tinggi Indonesia telah berkunjung keLaos yakni Menteri Pertahanan (2014), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014), anggota DPR komisi I (2015), dan Ketua BPK (2015). Sebaliknya pejabat tinggi Laos yang berkunjung ke Indonesia deputi PM dan Menlu Dr. Thongloun Sisoulith (2015), Ketua National Assembly, *Mrs*. Pany Yathourtu (2015) dan Wakil Menteri Luar Negeri (2015). Kunjungan antar kedua negara tidak terbatas hanya pada tingkat pejabat, namun juga delegasi untuk kegiatan pertemuan ASEAN maupun kerjasama lainnya.[[7]](#footnote-8)

Kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan dan keamanan antar kedua negara semakin intensif. Selain kerjasama dibidang pelatihan personil, Laos juga mempercayakan pembelian beberapa senjata kepada PT.Pindad, Indonesia. Pada tahun 2014 tercatat transaksi pembelian senjata model Assault Riffles Cal 5,56 mm SS V4, Assault Riffles Cal 5,6 mm SS2 V2 dan Pistol Cal 9 mm G2 Combat. Penggunaan semjata ini telah dimulai dengan partisipasi *The Lao People’s Army* (LPA) pada kejuaraan *AseanArmies Rifle Meet* (AARM 2015), dimana Laos berhasil meraih medali emas. Selain senjata, Indonesia juga telah memulai promosi pesawat tipe N-19 produksi PT Dirgantara Indonesia di Laos. Diharapkan pemerintah Laos berniat untuk melakukan pembelian mengingat jenis pesawat ini sesuai dengan kondisi geografis Laos.[[8]](#footnote-9)

Terkait kerjasama Indonesia-Laos di bidang pengembangan SDM, Pemerintah Indonesia dan Laos telah menandatangani MoU mengenai *Road Safety Management* yang ditandatangani tanggal 28 November 2014 di Myanmar. Pihak Kementrian Perhubungan Indonesia telah menawarkan pelatihan kepada pihak terkait di Laos, yang pelaksanaannya diselenggarakan pada tanggal 7-19 September 2015 di Denpasar, Bali. selain itu pada bulan Oktober 2015, kerjasama dibidang *capacity building and information sharing* dibidang keuangan telah tertuang dalam MoU antara BPK RI dan *National State Audit Agency Laos*.[[9]](#footnote-10)

Diplomasi dalam bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam diplomasi publik Indonesia yang disebut *multy track diplomacy*. Hal ini mengacu kepada kondisi sistem hubungan internasional dewasa ini sudah semakin diwarnai oleh fenomena yang meluangkan kemitraan antara berbagai komponen kepublikan dalam interaksi hubungan internasional.Peranan diplomasi komponen ini tidak kalah dengan praktek diplomasi publik yang dilakukan oleh negara.Dalam bidang pendidikan, misalnya, keterlibatan akademisi dalam membangun diplomasi publik dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Bentuk diplomasi ini, lanjutnya, bisa dilakukan dengan pertukaran guru dan dosen, pertukaran hasil riset, pergelaran seni budaya, dialog antara agama, dan sebagainya.

Keunikan dari peran serta pelaku diplomasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dalam implementasi diplomasi publik adalah kerjasama yang mengarah pada perolehan saling menguntungkan, menghormati dan menghargai.Kondisi tersebut dapat mendorong kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta kualitas sumber daya manusia. Selain itu, komponen diplomasi pendidikan berpotensi untuk menampilkan gagasan-gagasan baru.

Pada tahun 1987 tujuan dari pendidikan Laos dirancang ulang dalam konteks pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan selaras dengan Mekanisme Ekonomi Baru (NEM), melalui pendidikan sebagai pendorong dalam pembangunan sosial-ekonomi dan memberikan prioritas untuk pengembangan sistem pendidikan yang dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh ekonomi modern. Sejak saat itu telah terjadi perbaikan dalam sistem pendidikan pada semua tingkatan, meskipun sebenarnya sektor ini terus terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia, staf pengajar di bawah kualifikasi, kurikulum yang tidak memadai, fasilitas yang kurang baik dan kurangnya peralatan mengajar. Dalam hal ini tentunya Indonesia harus memiliki peranannnya dalam kerjasama di bidang pendidikan yang bertujuan untuk membantu Laos memperbaiki pendidikan di negaranya.

Dalam bidang pendidikan antara Indonesia-Laos, pemerintah Indonesia memberikan beberapa Beasiswa Darmasiswa, Kemitraan Negara Berkembang (KNB) dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Beasiswa yang diberikan telah banyak melahirkan *Friends of Indonesia* di Laos yang senantiasa membantu kegiatan KBRI Vientiane. Selain beasiswa, pelatihan di bidang seni dan budaya bagi masyarakat Laos diberikan melalui kursus Bahasa Indonesia yang dilakukan secara *Regular* selama 10 bulan setiap tahunnya serta pelatihan seni budaya lainnya yang dikemas dalam wadah *workshop* (Tari, pembuatan batik, dan film dokumenter). Pemerintah Indonesia melalui SEAMEO QTEP Indonesia juga telah memberikan sumbangsih dalam upaya penigkatan kualitas tenaga pengajar di Laos melalui pemberian bantuan pelatihan teknis kepada sejumlah lembaga pendidikan di Laos. Tidak hanya di bidang pendidikan, pelatihan teknis juga diberikan kepada para pekerja di bidang agrikultur, pertanian dan pengukiran kayu melalui mekanisme Kerjasama Selatan-Selatan dan bantuan pelatihan dari Kementrian Perindustrian Indonesia.[[10]](#footnote-11)

Program-program yang telah di lakukan Indonesia tentunya memiliki dampak yang sangat baik bagi hubungan bilateral kedua negara dan tentunya membantu dalam proses diplomasi melalui pengenalan kepada masyarakat mengenai Indonesia yang berpengaruh kepada rasa ingin tahu masyarakat Laos terhadap Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama pemerintah Indonesia melalui kerjasama bilateral, membantu Laos pada pengembangan kapasitas di berbagai sektor, melalui beasiswa dan pelatihan bagi siswa Laos. [Universitas Gadjah Mada](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Gadjah_Mada) di Indonesia dan Universitas Nasional Laos sepakat untuk menandatangani perjanjian pendidikan. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Pemerintah Jepang (JICA), NAM Centre dan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, untuk mengatur berbagai pelatihan dan beasiswa.[[11]](#footnote-12)

Pemerintah Laos sangat menghargai sikap dan bantuan pemerintah Indonesia pada semasa perjuangan kemerdekaan dan dukungan kuat Indonesia terhadap Laos menjadi anggota Asean. Sebaliknya Indonesia juga memandang Laos sebagai sahabat yang dapat diandalkan dan selalu mendukung kepentingan Indonesia diberbagai forum.KBRI Vientiane merupakan garis terdepan Indonesia dalam berdiplomasi, sebagai representatif dan sebagai alat untuk lebih mengenalkan Indonesia di Laos.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa peran KBRI sangat penting dalam mempromosikan Indonesia di Laos, maka dari itu penyusun memutuskan untuk mengambil judul penelitian:

**“Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia-Laos Melalui Diplomasi KBRI Vientiane Dalam Mempromosikan Indonesia**

**Tahun 2010-2016”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas untuk memudahkan dalam menganalisa masalah, penyusun mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama bilateral Indonesia-Laos sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016?

2. Bagaimana upaya diplomasi KBRI Vientiane Indonesia dalam bidang pendidikan di Laos?

3.Sejauh mana diplomasi KBRI Vientiane dalam bidang pendidikan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Laos?

## 1.2.1. Pembatasan Masalah

 Karena luasnya permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada **“Diplomasi KBRI Vientiane tahun 2010-2016 dalam bidang pendididkan sebagai bentuk dari upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan dan mempererat kerjasama bilateral Indonesia-Laos ”**

## 1.2.2. Perumusan Masalah

 Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan penyusun dalam melakukan pembahasan, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana Diplomasi KBRI Vientianepada tahun 2010-2016 Indonesia di Bidang Pendidikan pengaruhnya terhadap Menigkatnya Hubungan Bilateral antara Indonesia-Laos?”**

**1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Selain tujuan–tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini pun memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**A.** Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hasil dari kerjasama bilateral Indonesia-Laos pada tahun 2010-2016.

**B.** Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari diplomasi KBRI Vientiane dalam bidang pendidikan pada tahun 2010-2016.

**C.** Untuk mengetahui lebih dalam mengenai diplomasi KBRI Vientiane dalam bidang pendidikan pada tahun 2010-2016 pengaruhnya terhadap meningkatnya dan semakin eratnya hubungan bilateral antara Indonesia-Laos.

## 1.3.2. Kegunaan Penelitian

**A.** Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam bidang kerjasama bilateral antara Indonesia-Laos khususnya mengenai peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane dalam bidang pendidikan.

**B.** Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai peran sebuah perwakilan negara yang menjadi ujung tombak dalam berdiplomasi untuk memperjuangkan kepentingan sebuah negara di luar negeri.

**C.** Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dan melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Sekaligus mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

### 1.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 1.4.1. Kerangka Pemikiran

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teori-teori para pakar yang sesuai untuk permasalahan diatas. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan hubungan internasional sampai dengan teori kerjasama, teoripolitik luar negeri dan teori diplomasi yang dimunculkan sesuai dengan objek penelitian yang diambil yaitu mengenai;

**“Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia-Laos Melalui Diplomasi KBRI Vientiane di Bidang Pendidikan Tahun 2010-2016”**

Hubungan Internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi,sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia. Hoffman menyatakan bahwa ilmu hubungan internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara.[[12]](#footnote-13)

 Hubungan Internasional menurut Mochtar Mas’oed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi mendefinisikan bahwa:

**“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional. Yaitu meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi pemerintah dan pemerintah domestic serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bias terwujud kerjasama, pembentuan aliansi, perang, konflik, serta interarksi dalam organisasi internasional.”**[[13]](#footnote-14)

Selanjutnya Couloumbis dan Wolfe mendefinisikan Hubungan International sebagai berikut:

**“Hubungan Internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antar unit-unit social.”**[[14]](#footnote-15)

 Negara merupakan salah satu unsur penting dalam Hubungan Internasional, ide atau cita-cita untuk bersatu merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dapat membentuk suatu bangsa yang akan hidup dalam suatu negara. Oleh karena itu, rakyat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu merupakan unsur yang sangat penting bagi negara. Dahulu orang berpendapat bahwa suatu bangsa hanya dapat dibentuk oleh suatu masyarakat yang berasal dari satu keturunan, satu bahasa dan satu adat istiadat, namun pendapat ini tidak dapat dipertahankan karena tidak terbukti kebenarannya.

Menurut Roger H. Soltau yang dikutip dari buku karya Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik mendefinisakn bahwa:

**“Negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs of behalf of and in the name of the community*.”**[[15]](#footnote-16)

 Kedaulatan merupakan suatu institusi, yang berarti seperangkat aturan yang dijalankan oleh negara. Aturan itu menyatakan dan mengatur kemerdekaan eksternal dan kekuasaan negara domestik. “Tidak ada negara atau kelompok negara yang memiliki hak mengintervensi, langsung, atau tidak langsung, untuk alasan apapun, dalam masalah internal atau eksternal negara lain manapun” (PBB 1970). Dengan kata lain, pemerintah berkuasa di dalam wilayahnya sendiri dan merdeka dari negara lain. Banyak penstudi masih memikirkan tentang kedaulatan dalam hal sebagai institusi dasar masyarakat internasional (James 1986). [[16]](#footnote-17)

 Adapun kutipan dari Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1996 kaitannya dengan kedaulatan sebuah negara yang menyatakan bahwa:

**“Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada Negara, bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, Negara berdaulat berarti bahwa Negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dengan perkataan lain Negara memiliki monopoli dari pada kekuasaan. Suatu sifat khas dari pada organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan-tindakan sendiri apabila ia dirugikan, walaupun demikian kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya (Mochtar Kusumaatmadja,1996: 16-17).”**

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.[[17]](#footnote-18) Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilkinya.[[18]](#footnote-19)

Menurut Gibson (1986) yang dikutip dari buku Mohammad Shoelhi yang berjudul Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional mendefinisakn bahwa:

**“Politik luar negeri adalah rencana komprehensif yang dibuat berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan bisnis pemerintah dengan negara lain.”**[[19]](#footnote-20)

Selanjutnya Mappa Nasrun menjelaskan dalam desertasinya yang berjudul *Indonesian Relations With The South Pacific Countries* bahwa:

**“Kebijaksanaan luar negeri suatu negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijaksanaan luar negeri. Jadi, kebijaksanaan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.”**[[20]](#footnote-21)

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Selanjutnya Dougherty & Pfaltzgraff secara teori mendefinisikan bahwa kerjasama dan kerjasama internasional sebagai berikut:

**“Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasinal dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty&Pfaltzgraff,1997:418-419).”**

**Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk intstitusioanl yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (Dougherty&Pflatzgraff,1997:420).”**

**Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yan disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembngunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan (Dougherty&Pflatzgraff,1997:420).”**

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselengaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Kusumohamidjojo** tentang hubungan bilateral yakni :

**“Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdeketan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi. (Kusumohamidjojo, 1987:3).”**

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa:

***“*Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)(Krisna, 1993:18).”**

 Perwakilan Diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase. Istilah diplomatik (*diplomacy*), dalam hubungan internasional *”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”*. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Kedutaan atau Konsuler).[[21]](#footnote-22)

Dalam praktek internasional ada dua jenis perwakilan diplomatik :

Tingkatan dan Kepangkatan Perwakilan Diplomatik :

1. Kedutaan Besar***,*** yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antar negara tersebut.

2. Perutusan Tetap***,*** yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB).

Tingkatan dan kepangkatan perwakilan diplomatik menurut Kongres di Aachen tahun 1918 sbb :

**A**. Duta Besar (*Ambassador*) adalah tingkatan tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta Besar memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan pada negara yang punya hubungan erat dan banyak hubungan timbal balik. Dalam beberapa hal duta besar dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu.

**B**. Duta (*Gerzant*) adalah setingkat lebih rendah dari duta besar, biasanya ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal balik dan derajat kereratan hubungan lebih rendah dari pada negara yang mengirim duta besar. Segala persoalan yang menyangkut kedua negara, seorang duta harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negaranya.

**C**. Menteri Presiden (*Minister President*) adalah mereka yang tidak dianggap sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya.

**D**. Kuasa Usaha (*Charge D’affair*), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar negeri negara penerima. Berhubungan dengan kepala negara-negara penerima melalui menteri luar negeri negara penerima.

**E**. Atase (*Attache*),adalah tenaga ahli kedutaan, ada atase militer, atase perekonomian, atase pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain.[[22]](#footnote-23)

 Sebagai dasar hukum mengenai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003pasal 1 ayat 3 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

**“Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.”**[[23]](#footnote-24)

Komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Sebagai sebuah bidang kajian, komunikasi internasional memfokuskan perhatian pada keseluruhan proses melalui data dan informasi mengalir melalui batas-batas negara. Subjek yang ditelah bukanlah sekadar arus itu sendiri, melainkan juga struktur arus yang terbentuk, faktor-faktor yang terlibat di dalamnya, sarana yang digunakan, efek yang ditimbulkan, serta motivasi yang mendasarinya.

Dilihat dari pelakunya, komunikasi internasional dapat dipandang sebagai terbagi antara:

**1**. *Official Transaction* [transaksi resmi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transaksi_resmi&action=edit&redlink=1), yakni kegiatan komunikasi yang dijalankan pemerintah.

**2**. *Unofficial Transaction* [transaksi tidak resmi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transaksi_tidak_resmi&action=edit&redlink=1), yakni kegiatan komunikasi yang melibatkan pihak non-pemerintah.

Pemerintah, sebagai salah satu pelaku utama komunikasi internasional, menjalankan sejumlah langkah yang berpengaruh terhadap posisi negara yang diwakilinya dalam peraturan politik internasional. Pemerintah dapat menjalankan langkah-langkah yang berefek politik langsung, seperti: diplomasi dan propaganda; ataupun langkah yang berdampak tidak langsung, seperti: mempromosikan pendidikan internasional. Kegiatan komunikasi internasional bisa berlangsung antara *people to people* ataupun *goverment to government*. Markham (1970) menyatakan, unit primer yang diamati dalam komunikasi internasional adalah interaksi antara dua negara atau lebih yang sifatnya *Mass Mediated Communication*.[[24]](#footnote-25)

Tegasnya, komunikasi internasional juga adalah studi tentang berbagai macam *Mass Mediated Communication* antara dua negara atau lebih yang berbeda latar belakang budaya. Perbedaan latar belakang tersebut dapat berupa perbedaan ideologi, budaya, perkembangan ekonomi, dan perbedaan bahasa.

Menurut Sastropeotro dalam buku yang di tulis oleh Mohammad Shoelhi dengan buku yang berjudul Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional menjelaskan bahwa:

**“Komunikasi internasional mempelajari pernyataan antarnegara, antarpemerintah, atau antarbangsa yang bersifat umum melalui lambang-lambang yang berarti.”**[[25]](#footnote-26)

Selanjutnya Gerhard Maletzke menambahkan dalam bukunya Intercultural and International Coummunications yang dikutip dari buku Mohammad Shoelhi dengan buku yang berjudul Diplomasi Praktik Komunikasi Internasionalmenyatakan bahwa:

**“Komunikasi Internasional adalah proses komunikasi antara berbagai negara atau bangsa yang melintasi batas-batas negara.”**[[26]](#footnote-27)

 Dimulai pada tahun 1960-an, praktik diplomasi mulai mengalami perubahan. Professor Mowat dalam bukunya *Diplomacy and Peace* membagi diplomasi dalam tiga masa perkembangan. Ketiga perkembangan tersebut adalah pada tahun 467-1475 yang disebut dengan masa kegelapan, dimana diplomasi belum diorganisasi dengan baik. Kemudian pada tahun 1473-1914 yang disebut dengan diplomasi sistem negara eropa, dan pasca Diplomasi Terbuka *(open diplomacy)*. Sebagai hasil pemikiran dari Woodrow Wilson pada tahun 1928.[[27]](#footnote-28) Dalam diplomasi publik, Wilson mengatakan, “... *open covenant openlhy at, after which there should be private international understanding of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view”.* Pemikiran ini menekankan pada era demokrasi diplomasi dimana publik dapat melihat, mengkaji dan ikut menyampaikan aspirasinya yang berhubungan dengan diplomasi sebagai salah satu alat dalam kebijakan luar negeri. Hal ini menjadi rasional karena setiap dampak dari kebijakan luar negeri akan menyentuh publik, sehingga publik sendiri seharusnya dilibatkan dalam proses diplomasi.

 Menurut Garden yang dikutip dari buku karya Mohammad Shoelhi yang berjudul Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional menyatakan bahwa:

**“Diplomasi adalah ilmu mengenai hubungan-hubungan serta kepentingan-kepentingan dari negara-negara atau seni untuk mendamaikan/mempertemukan perbedaan-perbedaan gagasan antar bangsa, dan secara lebih khusus lagi, diplomasi adalah seni berunding.”**[[28]](#footnote-29)

 Sebagai tambahan Roy Olton dan Jack C. Plano dalam bukunya yang berjudul *Internasional Relations Dictionary* mendefinisakan bahwa diplomasi sebagai berikut:

**“Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah jurisdiksi sebuah negara.”**[[29]](#footnote-30)

Pendidikan merupakan instrument yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Kesusksesan sebuah negara membangun sistem pendidikan bisa menjadi salah satu tolak ukur dari kesuksesan generasi yang berhasil pada masa yang akan datang.Ki hajar Dewantara merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ki Hajar dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai berikut:

**“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.”**[[30]](#footnote-31)

**Sebagai tambahan Menurut UU No.20 tahun 2003** tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

**“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”**[[31]](#footnote-32)

Pada tahun 2014 dalam pernyataan yang dikutip dari surat kabar Sinar Harapan sesaat setelah acara Pembukaan 8th ASEAN Education Ministers Meeting, Bapak Emir Wisnandar yang merupakan Duta Besar RI untuk Laos mengatakan bahwa:

**“Selama ini Indonesia telah berperan dalam kerja sama antarnegara anggota ASEAN, termasuk dengan Laos. Indonesia telah memberikan kesempatan para mahasiswa asal Laos yang ingin menempuh pendidikan di berbagai universitas dan perguruan tinggi di Indonesia.”**[[32]](#footnote-33)

Dalam kesempatan lain sambutan Bapak Irmawan Emir Wisnandar sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Laos dalam acara *“Get Together”* yang juga muat dalam surat kabar nasional dari Laos yakni KPL dan Vientiane Times pada bulan April 2016 mengatakan bahwa:

**“Indonesia dan Laos telah memiliki hubungan yang lama dan memiliki persamaan kebiasaan budaya yang menjadi kunci untuk saling mengerti antar kedua negara.”**

Pada kesempatan yang sama dalam sambutan pada acara *“Get Together”*, sebagai Presiden *Laos Indonesia Frienship Asssociation* Bapak Phanthong Phommahaxay mengatakan bahwa:

**“ Laos dan Indonesia berbagi dalam perasamaan dan itu adalah salah satu alasan mengapa kita harus saling membantu satu dan yang lain dan meningkatkan solidaritas antar kedua negara.”**

## 1.4.2. Hipotesis

 Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, maka penyusun menarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

 **“ Jika Hubungan bilateral Indonesia-Laos melalui diplomasi KBRI Vientiane di bidang pendidikan ditingkatkan dan maka, pengetahuan masyarakat Laos terhadap Indonesia akan meningkatdan semakin besarpengaruh Indonesia di Laos ”**

## 1. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

 Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis diatas, maka tim penyusun membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis****(Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**Jika Hubungan bilateral Indonesia-Laos melalui diplomasi KBRI Vientiane di bidang pendidikan ditingkatkan | 1. Meningkatnya kerjasama di bidang pendidikan yang di implementasikan melalui program-program melalui KBRI Vientiane.2. Rencana Strategis (RENSTRA) KBRI Vientiane tahun 2015-2019. | 1. Data dan fakta berjalannya program-program pendidikan yang melalui KBRI Vientiane dan animo juga antusiasme dari masyarakat Laos.2. Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Nomor: 019/SK/DB/VTE/VI/2015. |
| **Variabel Terikat:**Maka, pengetahuan masyarakat Laos terhadap Indonesia akanmeningkatdan semakin besar pengaruh Indonesia di Laos  | 3. Rasa ingin tahu dan belajar beberapa aspek menegenai Indonesia cukup tinggi. | 3. Tingkat kesuksesan yang sangat baik dari setiap acara maupun program-program yang di selenggarakan oleh KBRI Vientiane. |

Tabel 1 Variabel dan Indikator

KERJASAMA BILATE RAL

INDONESIA-LAOS

KBRI VIENTIANE

DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA

DIPLOMASI DI BIDANG PENDIDIKAN

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT LAOS

PENGETAHUAN MENGENAI INDONESIA MENINGKAT DAN PENGARUH INDONESIA DI LAOS SEMAKIN BESAR

BERPERAN DALAM PROGRAM-PROGRAM YANG DI ADAKAN

### 1.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.5.1 Tingkat Analisis

 Penggunan tingkat analisis dalam penelitian adalah analisa korelasionis, yang unit eksplenasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama.

## 1.5.2 Metode Deskriptif Analisis

Metode yang digunakan dalam penlitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis:

**A. Metode Deskriptif Analisis:** Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah serta menganalisis fenomena kebijakan pemerintah dalam penanganan pelanggaran perizinan yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual ditengah realita serta berusaha memecahkan masalah. Dalam prakteknya, tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data kebijakan luar negeri Indonesia dalam hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Laos melalui diplomasi KBRI Vientiane.

**B. Metode Historis Analitis:** Metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta khusus mengenai kejadian masa lampau yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Laos melalui diplomasi KBRI Vientiane dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, lalu ditarik kesimpulannya untuk kemudian di komperasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi pada masa yang akan datang.

## 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi di lapangan dan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan kegiatan magang, menghadiri pameran dan seminar, mewawancarai narasumber, mencari kepustakaan buku dan informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik dari artikel-artikel, jurnal, internet dan buku-buku.

### 1.6 Lokasi dan Lamanya Penelitian

### 1.6.1. Lokasi Penelitian

 Dalam penelitian ini tim penyusun memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat diantaranya:

**A.** Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane, Kaysone Phomvihane Avenue, P.O. BOX 277 Lao P.D.R.

**B.** Kementrian LuarNegeri RI, Jln. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat10110.

**C.** Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Jln. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung.

**1.6.2. Lama Penelitian**

 Lama penelitian adalah 5 (Lima) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2016.

## 1.7 Sistematika Penulisan

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisikan uraian atau informasi umum/dasar/awal/mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum mengenai Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia-Laos.

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana Diplomasi KBRI Vientiane di Bidang Pendidikan.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variable bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini ialah Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia-Laos Melalui Diplomasi KBRI Vientiane dalam Mempromosikan Indonesia.

**BAB V: KESIMPULAN**

Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.

1. Jack C. Plano dan Roy Olton,*Kamus Hubungan Internasional*(Bandung: Abardin,1999), hlm.5. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm.184. [↑](#footnote-ref-3)
3. Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://id.wikipedia.org/wiki/Laos#Penduduk>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Jauh Republik Demokratik Rakyat Laos* (Vientiane: KBRI Vientiane, 2015), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*,hlm 8. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.*, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://www.kemlu.go.id/vientiane/id/Pages/Laos.aspx>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-12)
12. A. A. Banyu Perwita dan Yanyan M. Y, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-13)
13. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi*, (Jakarta: LP3S, 1987), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-14)
14. <http://duniabaca.com/definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-15)
15. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-16)
16. Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 338. [↑](#footnote-ref-17)
17. James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press1976), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-18)
18. James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy* (New York: The Free Press1980), hlm. 171-173. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Simbiosa Rekamata Media ,2011), hlm 133. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mappa Nasrun, *Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problem and Prospect, Desertasi*, (Unahs: 1990), hlm. 98. [↑](#footnote-ref-21)
21. http://www.rimanews.com diakseskan tanggal 9 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-22)
22. http://soef47.wordpress.com. diakseskan tanggal 9 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-23)
23. <http://hukum.unsrat.ac.id/pres/keppres_108_2003.pdf>. Diakses tanggal 15 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-24)
24. <https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_Internasional>.Di akses pada tanggal 15 juni 2016. [↑](#footnote-ref-25)
25. Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
27. Yulius P Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi* (Bandung:Graha Ilmu, 2007), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-28)
28. Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-29)
29. Roy Olton dan Jack C. Plano. *Internasional Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda.(Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999), hlm. 201. [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://duniabaca.com/definisi-pendidikan.html>. Di akses tanggal 8 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
32. <http://www.sinarharapan.co/news/read/140912076/ri-berikan-banyak-kesempatan-bagi-mahasiswa-laos-span-span->.Diakses pada tanggal 30 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-33)